

DISEMINASI KOLEKSI LOKAL: PEMBANGUNAN REPOSITORI INSTITUSI PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Chaidir Amir¹, Riche Cynthia Johan²

Abstrak

Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan perpustakaan khusus yang memiliki fungsi sebagai pusat deposit, yaitu mengumpulkan dan menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya. Pada tahun 2016, Kemendikbud belum memiliki sistem informasi/pangkalan data terpadu koleksi lokal yang terintegrasi dan dikelola secara sistematis guna menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Program pengembangan yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan sistem informasi/pangkalan data terpadu koleksi lokal adalah pembangunan repositori institusi. Pembangunan repositori institusi ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, melestarikan dan menyebarkan (diseminasi) publikasi/terbitan internal lembaga, dokumen publik lembaga serta karya intelektual dan penelitian yang dihasilkan oleh sumber daya manusia di Kemendikbud dalam bentuk elektronik. Dalam rangka membangun repositori institusi ini, unit di dalam lembaga yang memiliki tanggung jawab dan memiliki peranan yang sangat kuat adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan unit yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengelola, melestarikan dan mendiseminasi kekayaan intelektual institusi. Pustakawan akan menjadi pengelola yang baik dalam pembangunan repositori institusi. Melalui design and development model riset diperoleh hasil pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud sebagai berikut: 1) data perpustakaan di lingkungan Kemendikbud telah terbaru melalui aplikasi direktori perpustakaan Kemendikbud. Sejumlah 96 perpustakaan di lingkungan Kemendikbud sudah mengisi data di aplikasi direktori perpustakaan; 2) Jenis koleksi lokal yang ada di lingkungan Kemendikbud telah terpetakan dan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud; 3) Kebijakan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud telah tersusun dan diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas operasional repositori institusi; 4) Repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud telah terpasang dan dapat diakses pada laman <http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id>; 5) Surat Edaran Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Terbitan/Publikasi) Kemendikbud yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud telah diterbitkan dan disebar ke seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud; dan 6) Sistem pencarian yang terintegrasi antara repositori institusi dan sistem otomatis perpustakaan dapat diakses melalui laman Perpustakaan Kemendikbud <http://perpustakaan.kemdikbud.go.id>.

Kata kunci: koleksi lokal, repository institusi, *design and development research*, perpustakaan kemdikbud

Abstract

The Ministry of Education and Culture Library is a special library as a deposit center that performs the functions of collecting and storing all publications from and about its parent institution. Until 2016, the Ministry of Education and Culture had not yet developed a systematically integrated and managed information / database system of internal collection so as to disseminate public information to the public. The development program that can be carried out so as to build an integrated information / database system of internal collection is the development of institutional repository. The development of this institutional repository aims to collect, store, manage, preserve and disseminate the institution's internal publications, institution's public documents as well as intellectual properties and researches, all in electronic form, produced by the Ministry human resources. Library, as a unit within the

¹ Kepala Subbagian Perpustakaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

² Ketua Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

institution, has a responsibility and plays a key role in building this institutional repository. Library is a unit that performs the functions of collecting, storing, managing, preserving and disseminating institution's intellectual properties. Librarians will properly manage the development of the institutional repository. The results of the research of design and development model concerning the development of the Ministry library repository are as follows: 1) Library data in the Ministry has been updated using the Ministry library directory application. A total of 96 libraries within the Ministry have submitted their data to the library directory application; 2) The types of internal collections within the Ministry have been mapped and become material in the preparation of the institutional repository policy of the ministry; 3) The institutional repository policy of the Ministry has been prepared and is expected to be a guide for parties involved in the operational activities of institutional repository; 4) The institutional repository of the Ministry has been installed and can be accessed on the website <http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id>; 5) The form letters of Printed and Recorded Works (Publications) Handover Obligation of the Ministry signed by the Secretary-General of the Ministry have been issued and distributed to all work units within the Ministry; and 6) The web search engine which is integrated between institutional repository and library automation system can be accessed through the Ministry page at <http://perpustakaan.kemdikbud.go.id>.

Keywords: *internal collections, institutional repository, design and development research, ministry of education and culture library*

Pendahuluan

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) adalah satuan kerja (satker) di bawah Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). BKLM menyelenggarakan fungsi: 1) koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga; 2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan; 3) pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan; 4) pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media; 5) pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6) pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan; 7) koordinasi dan pelaksanaan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan; 8) evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Subbagian Perpustakaan merupakan salah satu Subbagian di bawah Bagian Publikasi, BKLM yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan

Sekretariat Jenderal, Subbagian Perpustakaan memiliki rincian tugas sebagai berikut: 1) melakukan penyusunan program kerja Subbagian konsep program kerja bagian; 2) melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan bahan koleksi; 3) melakukan pengadaan bahan koleksi perpustakaan; 4) melakukan pengolahan koleksi perpustakaan; 5) melakukan pengembangan koleksi perpustakaan; 6) melakukan penyimpanan bahan koleksi pustaka; 7) melakukan pemeliharaan, perawatan, pengamanan koleksi perpustakaan; 8) Melakukan pemberian layanan pemustaka; 9) melakukan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan perpustakaan dan pustakawan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10) melakukan penyusunan bahan kerja sama promosi perpustakaan; 11) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 12) melakukan penyusunan laporan Subbagian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Kemendikbud termasuk ke dalam kategori perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan perpustakaan dan pustakawan di lingkungan Kemendikbud, Subbagian Perpustakaan perlu melakukan koordinasi dan kerjasama antar perpustakaan di lingkungan Kemendikbud guna terselenggaranya pelayanan perpustakaan yang terintegrasi dan berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan. Selain itu, setiap perpustakaan juga diharapkan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional. Tugas perpustakaan khusus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah adalah melayani pemustaka dengan menyediakan bahan perpustakaan/bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya. Sedangkan fungsi perpustakaan khusus adalah sebagai perpustakaan rujukan, pusat deposit, dan pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Fungsi perpustakaan khusus sebagai pusat deposit memiliki makna perpustakaan khusus harus mengumpulkan dan menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya. Ketentuan terkait kerjasama perpustakaan di dalam SNP menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan pemustaka, perpustakaan melakukan kerjasama dengan unit kerja di lingkungan instansi dan/atau di luar instansi yang bersangkutan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Setiap harinya unit kerja di lingkungan Kemendikbud menghasilkan data, informasi, dan publikasi/terbitan yang menjadi dokumen publik. Dokumen tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat diakses oleh publik dengan mudah dan cepat.

Pada tahun 2016, Kemendikbud belum memiliki pangkalan data informasi, dan publikasi/terbitan yang terintegrasi dan terkelola secara sistematis guna menyebarkan informasi publik kepada masyarakat luas. Kondisi koleksi lokal di Perpustakaan Kemendikbud pada tahun 2016 hanya 2.257 eksemplar atau 6,81 % dari

total keseluruhan koleksi yang dimiliki Perpustakaan Kemendikbud. Informasi lebih jelas mengenai jumlah koleksi di Perpustakaan Kemendikbud pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Jenis Koleksi	Total	Persentase
1	Koleksi Umum	30,864	93.19%
2	Koleksi Lokal	2,257	6.81%
Total		33,121	100.00%

Tabel 1. Jumlah Koleksi Perpustakaan Kemendikbud (Sumber: Perpustakaan Kemendikbud per Juni 2016)

Berdasarkan survei pemustaka di Perpustakaan Kemendikbud, mayoritas tujuan pemustaka yang mengakses Perpustakaan Kemendikbud adalah untuk mencari publikasi Kemendikbud dan mencari informasi terkait bidang pendidikan dan kebudayaan. Informasi lebih jelas mengenai tujuan pemustaka mengakses Perpustakaan Kemendikbud dapat dilihat pada Tabel 2.

No	Tujuan ke Perpustakaan	Jumlah	Persentase
1	Mencari publikasi Kemdikbud	16	15.24 %
2	Mencari informasi dikbud	27	25.71 %
3	Mencari jurnal ilmiah	17	16.19 %
4	Mencari koleksi anak	5	4.76 %
5	Mencari terbitan berkala	19	18.10 %
6	Mencari koleksi hiburan	14	13.33 %
7	Mengikuti aktifitas komunitas	6	5.71 %
8	Lain-lain	1	0.95 %
Total		105	100 %

Tabel 2. Tujuan Pemustaka Mengakses Perpustakaan Kemendikbud (Sumber: Survei Pemustaka Perpustakaan Kemendikbud Tahun 2015)

Salah satu unit di suatu organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan berbagai macam informasi adalah perpustakaan. Perpustakaan bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menata sampai menyebarkan informasi (*dissemination of information*) kepada pemangku kepentingannya. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 140 perpustakaan di lingkungan Kemendikbud (unit utama pusat dan UPT daerah) yang memiliki tugas mengelola perpustakaan di unit kerjanya masing-masing. Seluruh perpustakaan tersebut dapat diberdayakan dalam mengumpulkan data, informasi, dan publikasi/terbitan yang dihasilkan unit kerjanya masing-masing.

Sesuai dengan rincian tugas yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 11 tahun 2015, Subbagian Perpustakaan sepatutnya dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut dengan baik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu/masalah yang terkait tugas dan fungsi Subbagian Perpustakaan, yaitu: 1) belum optimalnya pengelolaan dan diseminasi koleksi lokal di Perpustakaan Kemendikbud, 2) rendahnya minat pegawai Kemendikbud mengakses dan menjadi anggota perpustakaan, 3) belum optimalnya mekanisme pengembangan dan pengolahan koleksi perpustakaan, dan 4) belum optimalnya mekanisme promosi perpustakaan. Dari keempat isu tersebut, isu/masalah yang menjadi perhatian utama untuk segera ditangani adalah belum optimalnya pengelolaan dan diseminasi koleksi lokal di Perpustakaan Kemendikbud. Faktor penyebab timbulnya isu/masalah utama tersebut adalah belum terintegrasinya pengelolaan koleksi lokal Kemendikbud serta belum adanya sistem infomasi/pangkalan data terpadu koleksi lokal sebagai masalah spesifik perlu segera ditangani.

Salah satu program/kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan oleh Subbagian Perpustakaan dalam rangka pembangunan sistem infomasi/pangkalan data terpadu koleksi lokal adalah pembangunan repositori institusi. Pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, melestarikan dan menyebarkan (diseminasi) publikasi/terbitan internal lembaga, dokumen publik lembaga serta karya intelektual dan penelitian yang dihasilkan oleh sumber daya manusia di Kemendikbud dalam bentuk elektronik. Keberadaan repositori institusi ini diharapkan dapat menjadi pusat dokumentasi digital sebagai sumber informasi terekam yang dibutuhkan dan dipertahankan oleh Kemendikbud untuk kepentingan informasi, pembuktian dan akuntabilitas dan produk intelektual yang dapat

diakses baik dari dalam maupun luar Kemendikbud. Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan adanya pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud sebagai sistem infomasi/pangkalan data terpadu koleksi lokal, guna mendukung pengelolaan dan diseminasi koleksi lokal yang dimiliki Kemendikbud saat ini. Pembangunan repositori institusi ini juga merupakan proyek perubahan yang dilakukan oleh Kasubbag Perpustakaan Kemendikbud dalam rangka Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2016.

Kajian Literatur

Institusional Repository

Istilah *Institusional Repository (IR)* merujuk pada sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Senada dengan definisi tersebut, Clifford Lynch dalam Bevan (2007) menyebutkan bahwa *Institusional Repository* merupakan satu set layanan yang ditawarkan oleh institusi atau lembaga kepada anggota komunitasnya untuk pengelolaan dan penyebaran materi digital yang dibuat oleh lembaga dan anggota masyarakatnya. Sedangkan menurut Stevenson dan Collin (2006, hlm. 104), *institutional repository* adalah '*... digital collection of all the information output by a single company or organisation*'.

Dalam rangka pembangunan repositori institusi, unit di dalam lembaga yang memiliki tanggung jawab dan memiliki peranan yang sangat kuat adalah perpustakaan. Karena perpustakaan merupakan unit yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengelola, melestarikan dan mendiseminasi kekayaan intelektual institusi. Jadi, pustakawan akan menjadi pengelola yang baik dalam pembangunan repositori institusi karena setiap kegiatan dalam repositori institusi merupakan pekerjaan tradisional perpustakaan dan merupakan kegiatan yang menjadi keahlian pustakawan. Sehingga, pengelolaan repositori institusi digital lembaga juga akan memberikan peluang bagi perpustakaan untuk tetap menempati posisi yang terdepan dalam mengkomunikasikan hasil karya lembaga induknya. Hal ini diperkuat oleh laporan Lynch yang dipublikasikan oleh *Association of Research Libraries* yang menyatakan bahwa pengembangan repositori institusi akan efektif jika terdapat kolaborasi antara pustakawan, ahli teknologi informasi, arsiparis, para pimpinan menengah, serta pembuat kebijakan.

Di Indonesia, sekarang ini, kebutuhan pengembangan repositori institusi menunjukkan

peningkatan. Banyak perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi sudah memikirkan pentingnya Repositori Institusi yang memuat karya terbitan ilmiahnya. Repositori Institusi memungkinkan akses terbuka dalam komunikasi ilmiah. Penerapan repositori dengan akses terbuka ini memungkinkan pengakuan terhadap hak intelektual tiap perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan di Indonesia berlomba-lomba membuka akses informasi sebesar-besarnya dengan aplikasi yang beragam pula.

Koleksi yang telah dimasukkan dalam pangkalan data repositori institusi tidak hanya dikumpulkan dan disimpan, namun juga dikatalog dan dapat dicari baik oleh institusi itu sendiri maupun komunitas dunia yang lebih besar, tergantung dari kebijakan cakupan pengguna dan institusi yang telah ditentukan. Dalam rangka

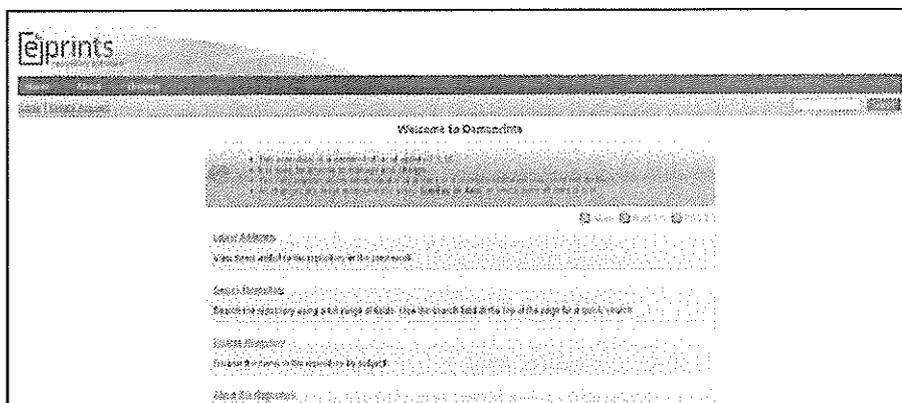
memudahkan proses pencarian koleksi yang tersimpan dalam repositori institusi diupayakan membuat standar metadata. Metadata ini akan sangat menentukan dalam temu kembali koleksi, dan setiap institusi bebas menentukan bagaimana metadata mereka dihasilkan dan standar mana yang mereka tentukan. Sebagai contoh, OAI (*Open Archives Initiative*) telah mengembangkan OAI-PMH (*OAI Protocol for Metadata Harvesting*) yang merupakan standar metadata repositori. Standarnya didasarkan pada Dublin Core, dan kebanyakan software repositori digital open source seperti DSpace, Fedora, dan Eprints mendukung OAI-PMH. Standar tersebut memungkinkan metadata repositori digital bisa dicari melalui mesin pencari, seperti: google dan OAIster (www.oaister.org).

ranking	World Rank	Institusi	Size	Visitors	Files Size	articles
1	98	Quoniam University Institutional Repository	405	332	43	25
2	108	Bogor Agricultural University Scientific Repository	42	395	274	16
3	171	Universitas Mahadewiyah Sukerta Digital Library	265	701	9	28
4	230	Yogyakarta State University Repository	633	610	66	55
5	306	Digital Library Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	831	751	108	81
6	318	Universitas Sebelas Maret Institutional Repository	764	826	95	74
7	330	Digital Repository Universitas Negeri Medan	266	950	15	125
8	333	Gadjah Mada State University Repository	72	1112	12	78
9	399	Hasanudin University Repository	114	854	257	251
10	489	Universitas Jember Repository	145	1421	128	56

Gambar 1. Sepuluh Repositori Institusi Terbaik di Indonesia Tahun 2016 (<http://repositories.webometrics.info/en/asia/indonesia>)

Trend peningkatan Pengembangan Repositori Institusi dimungkinkan hadirnya banyak aplikasi yang dapat dikembangkan secara publik dan terbuka, seperti DSpace

(www.dspace.org), EPrints (www.eprints.org), Digital Commons (www.bepress.com/ir), dan Fedora (www.fedora-commons.org).



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Repositori Institusi EPrints

Meskipun saat ini tersedia banyak aplikasi repositori institusi, hal tersebut tidak semerta-merta membuat pengembangan repositori institusi menjadi mudah untuk dilakukan. Tetap terdapat proses yang panjang dalam pengembangan repositori institusi. Setiap proses harus dipikirkan dengan matang yang dapat meminimalisir potensi permasalahan ke depannya. Pengembangan repositori institusi membutuhkan proses yang teknis dan manajerial, seperti tahap desain, implementasi, infrastruktur, fungsi dan fitur, perencanaan, penentuan skala prioritas, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kebijakan mengenai pemegang izin publikasi untuk permasalahan hak cipta juga sangat penting untuk dipikirkan.

Local Content

Beberapa pustakawan/praktisi yang bekerja di lembaga informasi cenderung menyamakan istilah *local content*, *institutional repository* dan *grey literature* dan tidak jarang ketiga istilah tersebut digunakan secara tumpang-tindih. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam praktiknya ketiga istilah tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Artinya, kandungan yang tersedia pada *institutional repository* sangat mungkin terdiri dari *local content* dan *grey literature*. Demikian juga sebaliknya, koleksi *local content* dan *grey literature* dalam format tercetak atau manuskrip tidak jarang dihimpun dan disimpan pada *institutional repository* ketika koleksi tersebut dikonversi dari bentuk analog ke digital.

Local content atau biasa diartikan 'muatan/isi lokal' mencakup *local collection* (koleksi lokal) dan *grey literature*. Koleksi lokal adalah sumber-sumber informasi (buku-buku dan dokumen) yang berkenaan dengan topik yang sifatnya lokal. Penjelasan koleksi lokal ini juga sejalan dengan pengertian yang disebutkan Stevenson dan Collin (2006, hlm 122) sebagai 'books and documents about a specific area close to where the collection is held'.

Diseminasi Digital Local Content

Secara umum, melalui diseminasi *digital local content*, masyarakat luas terutama masyarakat institusi dan peneliti dibantu dan memudahkan dalam menghasilkan pengetahuan, memetakan perubahan-perubahan masyarakat yang sedang berlangsung, dan menyebarkannya pada masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas, serta bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan masyarakat. Dengan upaya ini, perpustakaan khusus/institusi dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Terdapat beberapa dasar pemikiran yang mendorong sejumlah institusi untuk mengelola dan mengembangkan *digital local content* diantaranya: Pertama, penguatan *local content* dapat meningkatkan reputasi dan peringkat universitas

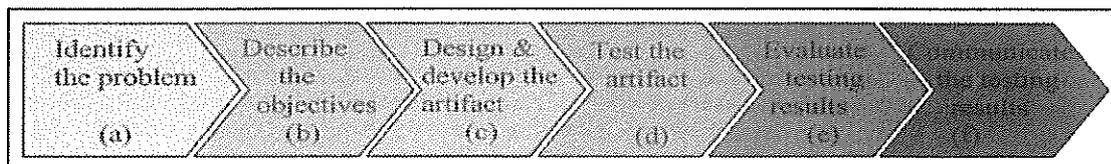
atau lembaga yang bersangkutan sekaligus mempertahankan keberlangsungan *local content* untuk akses jangka panjang atau dikenal dengan istilah preservasi digital; Kedua, diseminasi *local content* dapat menjangkau masyarakat pembaca yang lebih luas melampaui kemampuan yang bisa dilakukan sumber-sumber informasi tercetak. Hasil penelitian Ezema (2013, hlm.323) menunjukkan bahwa diseminasi hasil-hasil penelitian dari negara-negara berkembang sangat memprihatinkan sehingga kurang diketahui masyarakat luas. Ketiga, penyediaan *local content* dalam bentuk digital dapat meningkatkan visibilitas para penulis.

Metodologi Penelitian

Penggunaan metode penelitian desain dan pengembangan sebagai pendekatan yang dipilih dalam studi ini dilakukan karena adanya pandangan pragmatisme yang menyatakan bahwa metode ini dapat digunakan untuk "menguji teori dan memvalidasi kepraktisan disamping dipandang dapat menggambarkan cara untuk membuat prosedur, teknik dan alat baru berdasarkan analisis kebutuhan spesifik" (Richey & Klein, 2007). Dalam konteks penelitian ini metode penelitian desain dan pengembangan menekankan pada perancangan dan pengembangan pembangunan repositori institusi perpustakaan Kemendikbud.

Metode ini pertama kali diusulkan oleh Brown dan Collins pada tahun 1992 sebagai perluasan penelitian pendidikan lainnya, metode ini dikenal dengan istilah penelitian perkembangan dan penelitian berbasis desain. Pada implementasinya metode penelitian desain dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan praktik pendidikan melalui analisis, perancangan, pengembangan, dan strategi iteratif, implementasi, berdasarkan kolaborasi antara peneliti dan praktisi pada kebutuhan.

Menurut Peffers et al. (2007), mengadaptasi dari Nunamaker et al. (1991) and Hevner et al. (2004) dalam Ellis and Yair Levy (2010, hlm. 111), bahwa untuk mengembangkan metode penelitian desain dan pengembangan ini terdapat beberapa fase atau langkah yang harus diperhatikan diantaranya: a) *identify the problem motivating the research*; b) *describe the objectives*; c) *design and develop the artifact*; d) *subject the artifact to testing*; e) *evaluate the results of testing*; and f) *communicate those results*. Penggambarannya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Enam Langkah atau Fase Pengembangan Metode Penelitian Desain dan Pengembangan

Penjabaran dari setiap langkah dari desain dan pengembangan pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud terdeskripsikan dalam hasil penelitian.

Hasil Penelitian

Analisis Kebutuhan Pembangunan Repositori Institusi

Analisis Stakeholders Internal dan Eksternal: Peran dan Pengaruhnya

Stakeholders yang terlibat dalam pembangunan repositori institusi ini terdiri dari *stakeholders* internal (Tim Subbagian Perpustakaan, BKLM) dan *stakeholders* eksternal yang terdiri dari atasan dan eselon IV lainnya di BKLM, pihak/lembaga eksternal (narasumber/konsultan, Pustekkom dan Perpustakaan Nasional RI) sebagai pihak yang berkepentingan, serta pihak terkait lainnya (staf BKLM, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud, pegawai Kemendikbud, pemustaka umum) sebagai *users*.

Peranan dan Pengaruh Masing-Masing Stakeholders

Peranan *stakeholders* dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu peran primer dan peran sekunder. *Stakeholders* primer artinya *stakeholders* yang mempunyai pengaruh langsung terhadap upaya pembangunan repositori institusi, sedangkan *stakeholders* sekunder artinya *stakeholders* yang sifatnya menunjang/mendukung terhadap upaya peningkatan penggunaan dan keberhasilan pembangunan repositori institusi ini.

Stakeholders berdasarkan pengaruh dikelompokkan menjadi tiga yaitu *stakeholders* dengan pengaruh kuat, *stakeholders* dengan pengaruh sedang dan *stakeholders* dengan pengaruh lemah. *Stakeholders* dengan pengaruh kuat artinya *stakeholders* yang sangat menentukan terkait dengan pembangunan repositori institusi dan perannya tidak bisa digantikan oleh *stakeholders* lainnya. *Stakeholders* dengan pengaruh sedang, jika keberadaan *stakeholders* tersebut berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan, namun pada saat

yang bersamaan perannya dapat digantikan pihak lain. *Stakeholders* dengan pengaruh lemah maksudnya adalah keberadaan *stakeholders* berkaitan dengan kegiatan pembangunan repositori institusi tetapi tidak sampai memberi dampak terhadap kestabilan jalannya pembangunan repositori institusi tidak berhubungan secara langsung. Untuk lebih jelasnya tentang peranan dan pengaruh *stakeholders* akan dijelaskan pada Table 3 berikut.

No.	Pemangku Kepentingan	Peran		Pengaruh		
		Primer	Sekunder	Kuat	Sedang	Lemah
INTERNAL						
1	Tim Subbagian Perpustakaan	V		V		
EKSTERNAL						
1	Kepala BKLM	V		V		
2	Kepala Bagian Publikasi	V		V		
3	Narasumber/ Konsultan	V		V		
4	Kasubbag Publikasi		V		V	
5	Kasubbag Aspirasi Masyarakat		V		V	
6	Staf BKLM		V		V	
7	Pengelola Perpustakaan di lingkungan Kemendikbud	V		V		
8	Pustekkom	V		V		
9	Perpustakaan Nasional RI	V		V		
10	Pegawai Kemendikbud		V		V	
11	Pemustaka Umum		V		V	

Tabel 3. Pemetaan *Stakeholders* berdasarkan Peranan dan Pengaruh

Berdasarkan tabel 3 di atas, Perpustakaan Nasional mempunyai peran yang cukup besar (primer) dan pengaruh yang kuat. Hal ini dikarenakan Perpustakaan Nasional sebagai

pembina perpustakaan secara nasional memiliki kebijakan dan informasi yang cukup membantu dalam pembangunan repositori institusi ini. Hal sama juga terjadi di Pengelola Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbud dan Pustekkom sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat dari pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud.

Tanggapan/Respon Stakeholders

Pemetaan *stakeholders* berdasarkan tanggapan/respon ini menggambarkan tanggapan/respon *stakeholders* terhadap pembangunan repositori institusi. Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan *stakeholders* berdasarkan tanggapan/respon dalam pembangunan repositori institusi ini dalam dilihat pada Tabel 4 berikut.

No.	Pemangku Kepentingan	Tanggapan/ Respon		
		Mendukung	Menolak	Netral
INTERNAL				
1	Staf Subbagian Perpustakaan	V		
EKSTERNAL				
1	Kepala BKLM	V		
2	Kepala Bagian Publikasi	V		
3	Narasumber/Konsultan	V		
4	Kasubbag Publikasi	V		
5	Kasubbag Aspirasi Masyarakat	V		
6	Staf BKLM			V
7	Pengelola Perpustakaan di lingkungan Kemendikbud	V		
8	Pustekkom	V		
9	Perpustakaan Nasional RI	V		
10	Pegawai Kemendikbud			V
11	Pemustaka Umum			V

Tabel 4. Pemetaan *Stakeholders* berdasarkan Tanggapan/ Respon

Dari pemetaan *stakeholders* berdasarkan tanggapan/respon pada Tabel 4 di atas, terlihat bahwa hampir seluruh *stakeholders* mendukung pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud. Hanya ada 3 stakeholder, yaitu staf BKLM, Pegawai Kemendikbud, dan Pemustaka Umum yang belum terpetakan

dukungannya, mengingat pada saat pemetaan ini, pembangunan repositori institusi baru sampai pada tahap penyusunan draft dan pembuatan prototype, sehingga belum dapat diketahui respon ketiga *stakeholders* tersebut.

Kendala Internal dan Eksternal

Pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud ini tidak terlepas dari kendala yang bisa menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan ingin dicapai. Kendala yang muncul selama pelaksanaan pembangunan repositori institusi ini antara lain:

1. Terhambatnya pengumpulan data direktori perpustakaan di lingkungan Kemendikbud yang disebabkan oleh kendala teknis pemasukan data yang menggunakan aplikasi online;
2. Terhambatnya pengumpulan koleksi lokal dari unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang disebabkan belum terkelolanya sebagian besar koleksi lokal di masing-masing unit kerja;
3. Adanya resistensi dari sebagian staf terkait pola dan beban kerja yang akan dijalankan selama pembangunan repositori institusi.

Tujuan Pembangunan Repositori Institusi

Pemutakhiran Data Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbud

Pada pembangunan repositori institusi, data perpustakaan sebagai unit yang mengelola repositori institusi merupakan bagian yang sangat penting. Untuk itu, perlu dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Penyusunan direktori perpustakaan di lingkungan Kemendikbud terakhir kali dilakukan pada tahun 2011, untuk itu diperlukan pemutakhiran data direktori tersebut mengingat telah terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi Kemendikbud.

Pengumpulan data direktori perpustakaan pada tahun 2016 ini tidak dilakukan secara manual, namun menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan tim Subbagian Perpustakaan. Pengumpulan data secara *online* ini memudahkan baik dari perpustakaan di lingkungan Kemendikbud yang memasukkan data maupun bagi subbagian perpustakaan yang mengelola data tersebut. Aplikasi direktori perpustakaan dapat di akses melalui http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/direktori_perpustakaan.

Pada tahapan ini terdeteksi kendala terkait pemutakhiran data direktori perpustakaan secara *online* ini, cukup banyak perpustakaan yang mengalami kesulitan dalam pemutakhiran data karena alasan teknis. Pada tahapan ini juga terdata beberapa unit kerja yang tidak memiliki perpustakaan atau memiliki perpustakaan namun belum dikelola dengan baik.

Pemetaan Jenis Koleksi Lokal

Berdasarkan hasil survei/pemetaan jenis

koleksi lokal dapat diketahui bahwa jenis koleksi lokal yang dimiliki Kemendikbud sangat beragam, baik dari segi format/media fisik, maupun dari segi substansi isi. Secara umum, berdasarkan hasil survei/pemetaan jenis koleksi lokal, unit utama dan UPT di lingkungan Kemendikbud dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu unit utama, unit/lembaga diklat, dan unit/lembaga penelitian. Lebih jelas mengenai pengelompokan unit utama dan UPT di lingkungan Kemendikbud dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

No	Kategori Unit Kerja	Unit Kerja	Koleksi Lokal
1	Unit Utama	Sekretarian, Direktorat, Biro, Pusat	Kebijakan Kemendikbud (Pedoman, Panduan, Juklak, Juknis), Hasil Kajian
2	Unit/Lembaga Diklat	Pusdiklat, LPMP, P4TK, LP2KS	Materi Diklat, Hasil Belajar Peserta Diklat
3	Unit/lembaga Penelitian	Balai Bahasa, Balai Arkeologi, Dikmas, BPCB, BPNP	Hasil Penelitian, Jurnal

Tabel 5. Pemetaan Unit Kerja Berdasarkan Jenis Koleksi Lokal

Berdasarkan rekapitulasi hasil survei/pemetaan jenis koleksi lokal ini juga diketahui bahwa pengelolaan koleksi lokal di hampir semua unit kerja belum dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, unit kerja menyambut baik rencana pembangunan repositori institusi ini karena akan memudahkan dalam menyimpan dan mencari koleksi lokal yang dihasilkan seluruh unit kerja Kemendikbud.

Penyusunan Kebijakan Repositori Institusi Perpustakaan Kemendikbud

Kebijakan repositori institusi merupakan acuan/pedoman yang diperlukan oleh seluruh stakeholder dalam melakukan pembangunan repositori institusi ini. Kebijakan ini memuat seluruh aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan repositori institusi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu, kebijakan ini merupakan salah satu bagian inti dari pembangunan repositori institusi, dan harus disusun dengan seksama dan mempertimbangkan seluruh *stakeholders* yang ada, serta rencana pengembangan repositori institusi ke depan.

Pembangunan Prototype Repositori Institusi

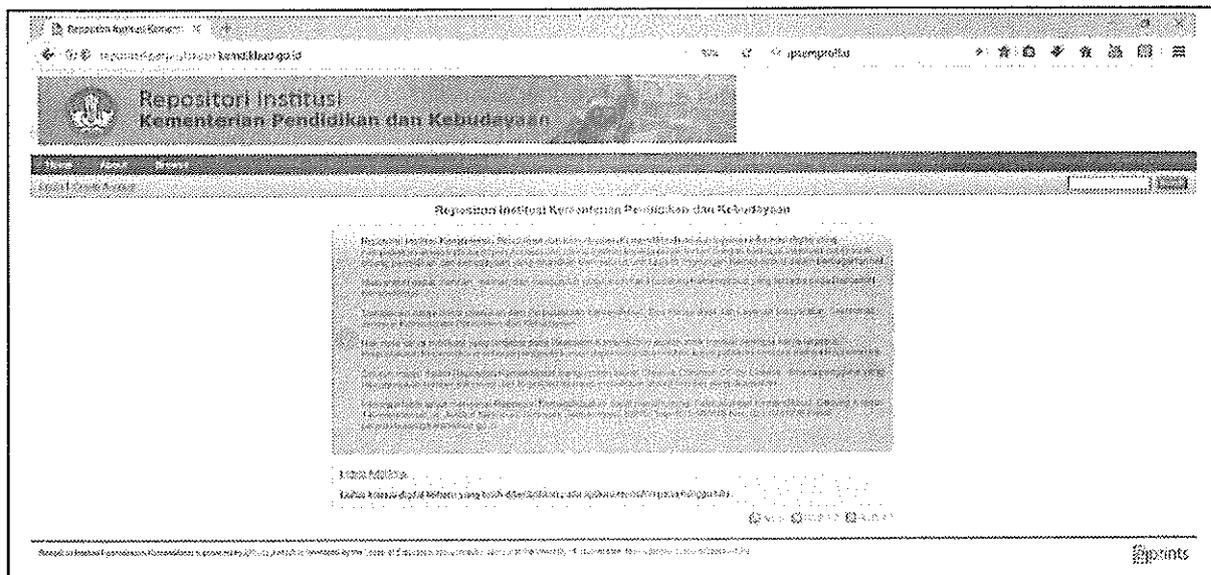
Pembangunan prototype repositori institusi merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembangunan repositori institusi ini. Setelah

mengumpulkan semua bahan terkait repositori institusi seperti: pemetaan data perpustakaan, pemetaan jenis koleksi, dan draft kebijakan repositori institusi, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan tim adalah melakukan pemilihan alternatif aplikasi repositori institusi yang akan digunakan. Pemilihan aplikasi ini perlu dilakukan dengan seksama mengingat aplikasi ini akan digunakan untuk mengelola data koleksi lokal Kemendikbud yang sangat besar, dan akan digunakan dalam jangka waktu panjang. Terdapat beberapa alternatif aplikasi repositori institusi, seperti: *EPrints*, *DSpace*, *Fedora Commons*, dan *Omeka*, yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Berdasarkan hasil masukan yang ada, disepakati bahwa aplikasi yang akan digunakan adalah *EPrints*. Aplikasi ini dipilih dengan mempertimbangkan fitur-fitur yang dimilikinya, kehandalan, kemudahan penggunaan, serta dukungan komunitas yang cukup banyak, mengingat *EPrints* ini merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Aplikasi *EPrints* ini sempat dibandingkan dengan *DSpace* mengingat pada versi *default* nya, *EPrints* belum mendukung tampilan dokumen video, sedangkan *DSpace* sudah mendukung tampilan dokumen video. Namun setelah dilakukan modifikasi, *EPrints* dapat mendukung tampilan video. Pada tahapan ini juga dibahas mengenai penempatan aplikasi ini di domain <http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id>, untuk itu perlu koordinasi lebih lanjut dengan

Pustekkom sebagai pengelola *domain* dan *hosting* di Kemendikbud. Selain itu, pada tahapan ini juga disepakati akan ada penggabungan sistem pencarian repositori institusi dengan sistem otomasi perpustakaan Kemendikbud, sehingga publik yang mencari

data, baik repositori institusi maupun bahan perpustakaan dapat mengaksesnya dalam satu laman pencarian. Tampilan laman repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Laman Repositori Institusi Perpustakaan Kemendikbud

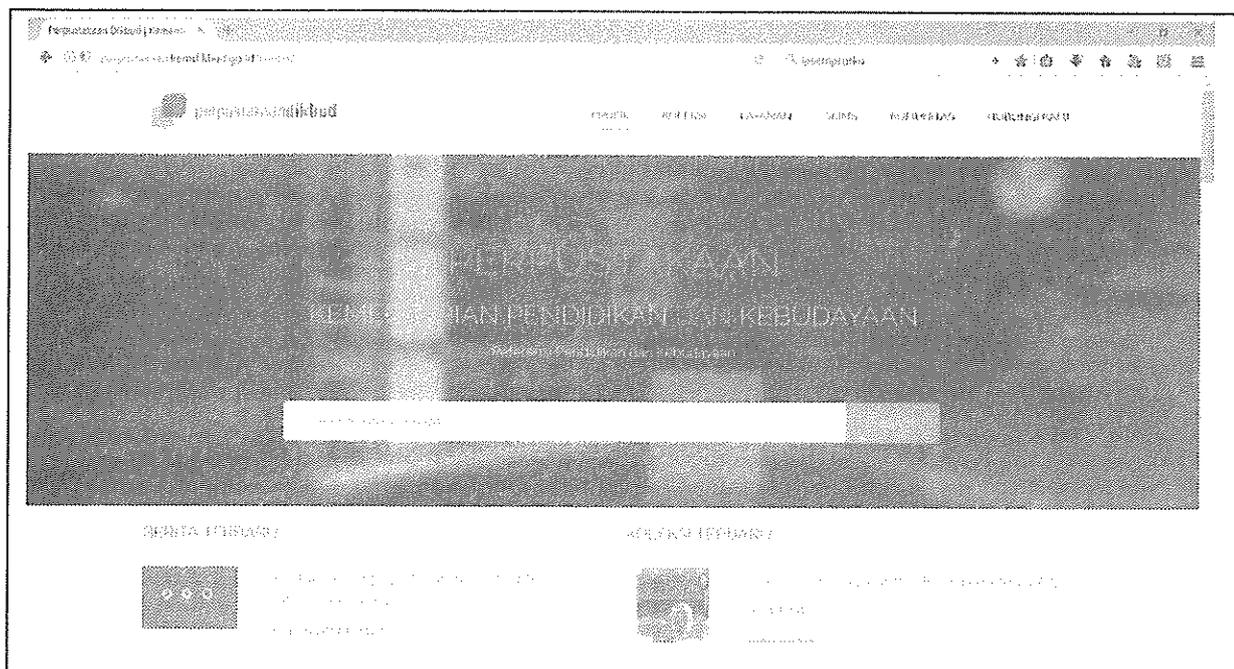
Ujicoba, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pada tahapan ini dilakukan uji coba pemasangan data dan dokumen ke dalam repositori institusi. Terdapat kendala dalam uji coba ini, yaitu koleksi lokal dari unit kerja di lingkungan Kemendikbud belum terkumpul semua. Untuk itu dilakukan pencarian koleksi lokal secara manual yang ada di portal Kemendikbud, pencarian ini dibantu oleh mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang ada di perpustakaan. Berdasarkan pencarian di portal Kemendikbud ini juga diketahui fakta bahwa banyak koleksi lokal yang belum terunggah ke dalam portal Kemendikbud.

Evaluasi terhadap pembangunan repositori institusi dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan yang mengundang seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal (Kepala BKLM, Pejabat BKLM, Tim Konsultan, Staf Subbagian Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI, Pustekkom, dan Pengelola Perpustakaan di Unit Utama Kemendikbud). Pada tahapan ini, telah terbit payung hukum repositori institusi yang tertuang dalam Surat Edaran Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan

Karya Rekam (Terbitan/Publikasi) Kemendikbud yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Melalui surat edaran ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan repositori institusi dalam berjalan dengan lebih baik dan mudah, terutama dalam hal pengumpulan koleksi lokal dari unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Surat edaran ini juga merupakan tindak lanjut dari surat edaran Perpustakaan Nasional tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam bagi Kementerian/Lembaga.

Hasil dari uji coba dan evaluasi yang dilakukan pada tahapan ini adalah melakukan tindak lanjut berupa revisi dari draft kebijakan repositori institusi dan pemasangan data koleksi lokal dalam repositori institusi. Penyempurnaan aplikasi juga terus dilakukan, terutama pembuatan sistem pencarian yang terintegrasi antara repositori institusi dan sistem otomasi perpustakaan. Sistem pencarian terintegrasi dapat diakses melalui laman Perpustakaan Kemendikbud <http://perpustakaan.kemdikbud.go.id> dan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sistem Pencarian Terintegrasi antara Repositori Institusi (*Eprints*) dan Sistem Otomasi Perpustakaan (*SLIMS*)

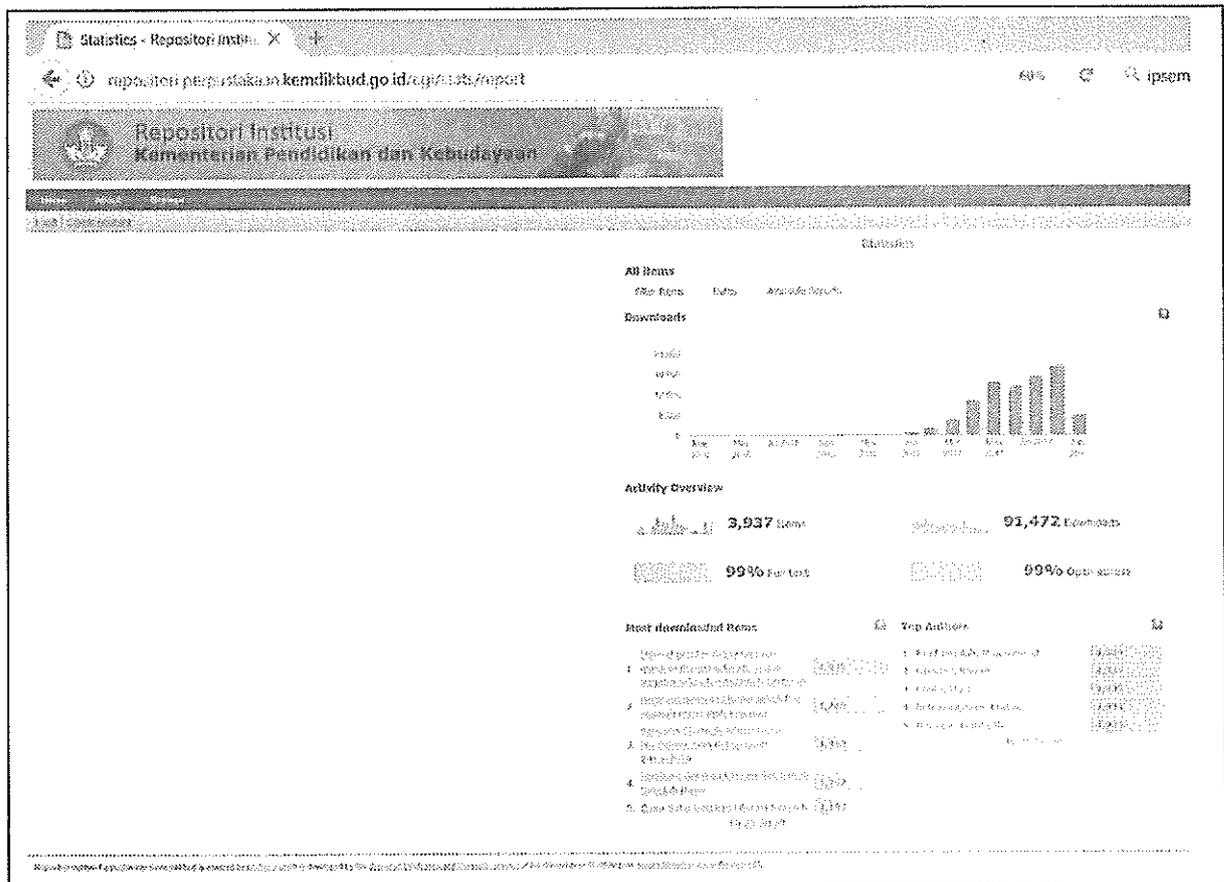
Total koleksi repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud sampai dengan September 2017 adalah 3.916 koleksi. Rincian terbitan/publikasi yang telah masuk ke dalam repositori institusi berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel 6.

No	Unit Kerja	Judul	%
1	Sekretariat Jenderal	357	9,12%
2	Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan	110	2,81%
3	Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	194	4,95%
4	Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah	88	2,25%
5	Dirjen Kebudayaan	124	3,17%
6	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	2799	71,48%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	241	6,15%
8	Inspektorat Jenderal	3	0,08%
Total		3.916	100%

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Koleksi Repositori Institusi Perpustakaan Kemendikbud (September 2017)

Total publik yang mengunduh koleksi repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud sampai dengan September 2017 adalah 91.472 unduh, yang terdiri dari 3.937 koleksi.

Statistik repositori institusi dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Statistik Repositori Institusi Perpustakaan Kemendikbud (September 2017)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis desain dan pengembangan dalam pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Data perpustakaan di lingkungan Kemendikbud telah terbaru melalui aplikasi direktori perpustakaan Kemendikbud. Total sudah 96 perpustakaan di lingkungan Kemendikbud yang sudah mengisi data di aplikasi direktori perpustakaan;
2. Jenis koleksi lokal yang ada di lingkungan Kemendikbud telah terpetakan dan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan repositori institusi perpustakaan Kemendikbud;
3. Kebijakan repositori insitusi Perpustakaan Kemendikbud telah tersusun dan diharapkan dapat menjadi panduan (*guidelines*) bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas operasional repositori institusi ini;
4. Repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud telah terpasang dan dapat diakses pada laman <http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id>.
5. Surat Edaran Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Terbitan/Publikasi) Kemendikbud yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud telah diterbitkan dan disebarkan ke seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud;
6. Sistem pencarian yang terintegrasi antara repositori institusi dan sistem otomasi perpustakaan, diakses melalui laman Perpustakaan Kemendikbud <http://perpustakaan.kemdikbud.go.id>.

Daftar Pustaka

- Bevan, Simon J. 2007. "Developing an institutional repository: Cranfield QUEprints – a case study", *OCLC Systems & Services*, Vol. 23 Iss: 2, pp.170 – 182. DOI (Permanent URL): 10.1108/10650750710748478
- Ezema, Ifeanyi J., 2013. "Local Contents and the Development of Open Access Institutional Repositories in Nigeria University Libraries: Challenges, Strategies and Scholarly Implications", *Library Hi Tech*, Vol. 31 No. 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Agenda Diagnosa Perubahan Organisasi*. Depok: Pusdiklat Pegawai Kemdikbud.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Agenda Proyek Perubahan*. Depok: Pusdiklat Pegawai Kemdikbud.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Agenda Tim Efektif*. Depok: Pusdiklat Pegawai Kemdikbud.
- Palmer, C. L., Tefteau, L. C., & Newton, M. P. (2008). Strategies for Institutional Repository Development: A Case Study of Three Evolving Initiatives. *Library Trends*, 57(2), 142–167.
- Pendit, Putu Laxman, *Perpustakaan Digital dari A Sampai Z*. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri, 2008
- Stevenson, Janet dan P. H. Collin, 2006. *Dictionary of Information and Library Management*. Second Edition. London: A & C Black Publishers Ltd
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

